

Beyond Guru Vokasi:

**Menjadi Mentor yang Membimbing Siswa Siap Kerja,
Berdaya Saing Global, dan Berwirausaha**

Dr. Fuad Abdillah, ST., MT.

Beyond Guru Vokasi:

**Menjadi Mentor yang Membimbing Siswa Siap Kerja,
Berdaya Saing Global, dan Berwirausaha**

Copyrights © 2025. All Rights Reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis:

Dr. Fuad Abdillah, ST., MT.

Penyunting:

Dr. Dhega Febiharsa, S.ST., M.Pd.

Desain & Tata Letak:

Tim Penerbit Cerdas Ulet Kreatif

ISBN :

Cetakan Pertama : **2025**

Penerbit :

CV. Cerdas Ulet Kreatif

Jl. Manggis 72 RT 03 RW 04 Jember Lor - Patrang

Jember - Jawa Timur 68118

Telp. 0331-4431347, 412387 Faks. 4431347

e-mail : info@cerdas.co.id

Distributor Tunggal:

CV. Cerdas Ulet Kreatif

Jl. Manggis 72 RT 03 RW 04 Jember Lor - Patrang

Jember - Jawa Timur 68118

Telp. 0331-4431347, 412387 Faks. 4431347

e-mail : info@cerdas.co.id

**Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

Ketentuan Pidana

Pasal 72 (ayat 2)

Barang Siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat diselesaikan sebagai bentuk refleksi, respons, dan ajakan untuk bertransformasi dalam menghadapi tantangan dan peluang di era disrupsi digital yang terus berubah dengan cepat.

Pendidikan vokasi khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memegang peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap kerja, adaptif terhadap perubahan teknologi, serta mampu menciptakan nilai ekonomi melalui kewirausahaan. Namun, untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan sosok guru vokasi yang tidak hanya menguasai kompetensi teknis, tetapi juga mampu menjadi mentor, fasilitator, inovator, bahkan arsitek masa depan bagi para siswanya.

Buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus harapan: prihatin terhadap kesenjangan antara lulusan SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), namun penuh harap bahwa guru vokasi memiliki potensi luar biasa untuk menjadi agen perubahan jika diberi ruang, dukungan, dan arah yang tepat. Judul *“Beyond Guru Vokasi”* dipilih bukan sekadar sebagai slogan, melainkan sebagai panggilan untuk melampaui batas-batas peran tradisional dari sekadar pengajar menjadi pembimbing holistik yang membekali siswa tidak hanya dengan keterampilan, tetapi juga etos kerja, literasi digital, daya saing global, dan semangat kewirausahaan.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa keguruan yang sedang mempersiapkan diri menjadi calon guru vokasi, guru-guru SMK yang ingin terus berkembang dalam profesinya, serta pengambil kebijakan pendidikan yang memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang ekosistem pendidikan vokasi yang relevan dan berkelanjutan. Di dalamnya, pembaca akan menemukan refleksi filosofis, kerangka kompetensi, model pengembangan diri, hingga strategi kolaborasi dengan industri semua disusun secara utuh dan aplikatif.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi juga katalisator perubahan menginspirasi setiap pembaca untuk berani melangkah “*melampaui*” dan berkontribusi nyata dalam membangun generasi emas Indonesia.

Semarang, Oktober 2025

Penulis

BEYOND GURU VOKASI, “CALL TO ACTION”

Di tengah gelombang disrupsi digital dan Revolusi Industri 4.0, pendidikan vokasi khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menghadapi tantangan eksistensial, apakah mampu menghasilkan lulusan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), atau justru semakin tertinggal oleh perubahan zaman? Buku *“Beyond Guru Vokasi”* hadir sebagai respons kritis sekaligus ajakan transformatif untuk menjawab tantangan tersebut dari akarnya, yaitu peran guru vokasi itu sendiri.

Buku ini, tidak hanya menggambarkan realitas kesenjangan antara lulusan SMK dan kebutuhan industri, tetapi juga menawarkan visi yang jelas dan terstruktur: guru vokasi harus melampaui peran tradisionalanya sebagai pengajar, menjadi pendidik holistik, praktisi industri, fasilitator, inovator, bahkan agen perubahan dan wirausahawan pendidikan (*teacherpreneur*). Buku ini ditujukan bagi calon guru, guru SMK yang sedang mengabdikan, hingga pengambil kebijakan pendidikan, siapa pun yang peduli pada masa depan SDM Indonesia.

Apa Isi Utama Buku Ini?

Buku ini disusun dalam lima bagian yang saling terkait secara logis dan progresif:

Landasan Profesi Guru Vokasi:

Bab awal memperkuat fondasi filosofis dan yuridis profesi guru, menegaskan bahwa guru bukan sekadar pekerja, melainkan tenaga profesional dengan tanggung jawab moral, intelektual, dan sosial yang tinggi. Di sini ditegaskan bahwa guru vokasi memiliki ciri khas: peran ganda sebagai pendidik dan praktisi industri.

Disrupsi dan Transformasi Digital:

Buku ini, mengurai secara mendalam bagaimana era disrupsi dan Revolusi Industri 4.0 mengubah wajah dunia kerja menghilangkan pekerjaan lama sekaligus menciptakan peluang baru. Dunia pendidikan vokasi ditantang untuk tidak hanya mengikuti arus, tetapi mengantisipasi masa depan dengan menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan yang belum ada dan teknologi yang belum ditemukan.

Kompetensi dan Pengembangan Diri:

Buku ini memperluas empat kompetensi inti guru (pedagogik, kepribadian, sosial, profesional) dengan kompetensi abad ke-21: literasi digital, keterampilan 4C (*Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication*), serta penguasaan HOTS dan kerangka TPACK (integrasi teknologi, pedagogi, dan konten). Guru didorong menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui strategi pengembangan diri mandiri maupun kolektif.

Ekosistem Pendukung Profesi:

Transformasi guru tidak mungkin terjadi tanpa dukungan sistemik. Buku ini menekankan pentingnya kebijakan nasional

(seperti Inpres Revitalisasi SMK), tata kelola sekolah yang visioner, kolaborasi strategis dengan DUDI, serta peran organisasi profesi dan kode etik sebagai pilar moral.

Visi Masa Depan: Beyond Vokasi:

Di bagian penutup, penulis menghadirkan konsep *teacherpreneur* yaitu guru sebagai inovator yang menciptakan produk dan jasa pendidikan berbasis keahlian praktisnya. Lebih dari itu, guru vokasi diposisikan sebagai arsitek masa depan bangsa, yang bertanggung jawab membentuk “**Generasi Emas Indonesia 2045**”.

Manfaat Setelah Membaca Buku Ini

Pemahaman Holistik: Pembaca memperoleh wawasan menyeluruh tentang peran strategis guru vokasi dalam pembangunan nasional, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai penghubung antara pendidikan dan dunia kerja.

Peta Kompetensi Jelas: Buku ini memberikan panduan konkret tentang kompetensi apa saja yang harus dimiliki dan dikembangkan guru vokasi di era digital dari literasi data hingga keterampilan berpikir kritis.

Model Aksi Nyata: Melalui model pengembangan kompetensi berbasis industri (siklus IN-ON, magang, sertifikasi), pembaca memperoleh kerangka kerja yang dapat langsung diimplementasikan di sekolah atau kebijakan.

Inspirasi dan Motivasi: Buku ini tidak hanya informatif, tetapi juga inspiratif. Ia mengajak pembaca untuk berani melampaui batas, menjadi bagian dari solusi, dan berkontribusi nyata dalam

membangun ekosistem pendidikan vokasi yang relevan dan berkelanjutan.

Panggilan untuk Kolaborasi: Di akhir, buku ini menjadi *call to action* bagi seluruh pemangku kepentingan guru, industri, pemerintah, dan calon pendidik untuk bersatu dalam gerakan kolektif demi masa depan pendidikan vokasi Indonesia.

Penutup

Beyond Guru Vokasi bukan sekadar buku teks atau kumpulan teori. Ia adalah manifesto transformasi sebuah peta jalan bagi siapa pun yang percaya bahwa guru vokasi memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan bangsa. Di tangan guru-guru yang visioner, adaptif, dan berjiwa wirausaha, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, melainkan keniscayaan. Membaca buku ini berarti memilih untuk tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi memimpinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
BEYOND GURU VOKASI, “CALL TO ACTION”	V
DAFTAR ISI	IX
BAB 1 KONSEP DASAR PROFESI DAN PROFESIONALISME GURU...	1
1.1. PENGERTIAN PROFESI	1
1.2. CIRI-CIRI PROFESI GURU	3
1.3. PROFESIONAL DAN PROFESIONALISME	5
1.4. PRINSIP-PRINSIP PROFESI GURU	7
BAB 2 HAKIKAT DAN PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN VOKASI ..	9
2.1. DEFINISI DAN FILOSOFI PENDIDIKAN VOKASI (PTK)	10
2.2. TUJUAN PENDIDIKAN VOKASI	12
2.3. PERAN PENDIDIKAN VOKASI DALAM PEMBANGUNAN SDM	13
BAB 3 GURU VOKASI: PENDIDIK, PRAKTISI, DAN AGEN PERUBAHAN.....	17
3.1. PROFIL GURU VOKASI	17
3.2. PERAN GANDA (DUAL ROLE): PENDIDIK DAN PRAKTISI	19
3.3. POSISI STRATEGIS GURU VOKASI: UJUNG TOMBAK DAN AGEN PERUBAHAN	21
BAB 4 MEMAHAMI ERA DISRUPSI DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0	27
4.1. DEFINISI DISRUPSI: LEBIH DARI SEKADAR INOVASI	28
4.2. PERKEMBANGAN REVOLUSI INDUSTRI: JEJAK SEJARAH PERUBAHAN..	30
4.3. KARAKTERISTIK REVOLUSI INDUSTRI 4.0 - ERA KONEKTIVITAS CERDAS	32
BAB 5 TANTANGAN DAN PELUANG PENDIDIKAN VOKASI DI ERA DIGITAL.....	35

5.1.	PERUBAHAN DUNIA KERJA DI ERA INDUSTRI 4.0	35
5.2.	PERGESERAN PERAN DARI TRANSFER OF KNOWLEDGE KE TRANSFER OF VALUE	38
5.3.	TIGA LITERASI BARU: BEKAL WAJIB DI ERA DIGITAL	39
5.4.	PELUANG INOVASI: REVITALISASI SMK MELALUI "LINK AND MATCH"	40
BAB 6	TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN VOKASI	43
6.1.	PARADIGMA PEMBELAJARAN BARU: BERPUSAT PADA SISWA, KOLABORATIF, DAN FLEKSIBEL	44
6.2.	MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF	45
6.3.	PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PEMBELAJARAN VOKASI	47
6.4.	KONSEP SMART CAMPUS	48
BAB 7	KOMPETENSI INTI GURU PROFESIONAL	53
7.1.	EMPAT KOMPETENSI GURU: SEBUAH KESATUAN YANG UTUH	54
7.2.	KOMPETENSI PEDAGOGIK: SENI MENGELOLA PEMBELAJARAN	54
7.3.	KOMPETENSI KEPRIBADIAN: MENJADI TELADAN YANG BERWIBAWA ..	57
7.4.	KOMPETENSI PROFESIONAL: PENGUASAAN MENDALAM PADA BIDANG KEAHLIAN	58
7.5.	KOMPETENSI SOSIAL: KEMAMPUAN BERINTERAKSI DAN BERKOMUNIKASI	59
BAB 8	KOMPETENSI DIGITAL DAN KETERAMPILAN GURU ABAD KE-21	61
8.1.	<i>DIGITAL AGE LITERACY</i> : MELEK TEKNOLOGI DI ERA DIGITAL	61
8.2.	KETERAMPILAN 4C: KUNCI SUKSES ABAD KE-21	63
8.3.	KERANGKA TPACK: MENGINTEGRASIKAN TEKNOLOGI, PEDAGOGI, DAN KONTEN	65
8.4.	KETERAMPILAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI (HOTS)	67
BAB 9	MENJADI GURU PEMBELAJAR SEPANJANG HAYAT	69
9.1.	DEFINISI GURU PEMBELAJAR	70
9.2.	TEORI BELAJAR SEUMUR HIDUP (LIFELONG LEARNING): LANDASAN KONSEPTUAL	70

9.3.	PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB): WUJUD AKTUALISASI PROFESI.....	72
9.4.	STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI: JALUR MANDIRI DAN KOLEKTIF....	73
BAB 10	MODEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU VOKASI BERBASIS INDUSTRI.....	78
10.1.	PENTINGNYA MODEL BERBASIS INDUSTRI.....	79
10.2.	SIKLUS PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU PRODUKTIF	80
BAB 11	PERAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN DI TINGKAT NASIONAL DAN INSTITUSI.....	88
11.1.	DUKUNGAN KEBIJAKAN NASIONAL: MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF	89
11.2.	PENDEKATAN EKOLOGIS: SINERGI DI BERBAGAI TINGKATAN	91
11.3.	PERAN MANAJEMEN INSTITUSI (SEKOLAH): DARI KEBIJAKAN KE AKSI.....	93
BAB 12	KOLABORASI STRATEGIS DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI	96
12.1.	URGENSI <i>LINK AND MATCH</i> : MENJEMBATANI KESENJANGAN KRONIS	97
12.2.	BENTUK-BENTUK KOLABORASI STRATEGIS	98
BAB 13	ETIKA PROFESI DAN PERAN ORGANISASI GURU	104
13.1.	KODE ETIK GURU INDONESIA: PEDOMAN MORAL DAN PERILAKU PROFESIONAL	105
13.2.	PERAN ORGANISASI PROFESI GURU: WADAH KOLEKTIF PROFESIONALISME	108
BAB 14	<i>TEACHERPRENEUR</i> DAN PERAN BARU GURU SEBAGAI INOVATOR	114
14.1.	KONSEP <i>TEACHERPRENEUR</i>	115
14.2.	PERAN-PERAN BARU GURU DI ERA DIGITAL	116
14.3.	WUJUD INOVASI: MENCIPTAKAN PRODUK DAN JASA PENDIDIKAN ..	118
BAB 15	VISI MASA DEPAN: GURU VOKASI INDONESIA	120
15.1.	SINTESIS DAN KESIMPULAN: TRANSFORMASI SEBAGAI KENISCAYAAN	121

15.2.	GURU SEBAGAI ARSITEK MASA DEPAN: MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045	122
15.3.	PANGGILAN UNTUK BERTINDAK (CALL TO ACTION)	124
DAFTAR PUSTAKA.....		127

BAGIAN I
LANDASAN PROFESI GURU
VOKASI

BAB 1

KONSEP DASAR PROFESI DAN PROFESIONALISME GURU

Bab ini bertujuan meletakkan fondasi pemahaman mengenai konsep dasar profesi dan profesionalisme, khususnya dalam konteks keguruan. Pemahaman ini krusial sebagai landasan bagi guru untuk menyadari kedudukannya yang terhormat dan mulia, serta tanggung jawab besar yang diembannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa

GURU PROFESIONAL



Gambar 1. Sketsa Guru Vokasi Profesional

1.1. Pengertian Profesi

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah profesi sering digunakan secara umum untuk merujuk pada pekerjaan apa pun yang menjadi

sumber penghasilan utama seseorang, baik di sektor formal maupun non-formal, seperti pedagang, dokter, guru, petani, hingga seniman. Bahkan, istilah "**profesional**" sering disematkan pada aktivitas yang bertentangan dengan moral dan etika, seperti "**penjahat profesional**" atau "**penipu profesional**". Namun, menurut Sutter (2025), dalam kajian akademis, profesi memiliki makna yang lebih spesifik dan mendalam. Untuk memahaminya secara komprehensif, makna profesi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang:

- a. Makna Etimologi: Secara etimologis, kata "profesi" berasal dari bahasa Inggris *profession* atau bahasa Latin *professio*, yang berarti mengakui, sebuah pengakuan, atau menyatakan diri mampu dan ahli dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.
- b. Makna Terminologi: Secara terminologis, profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang menekankan pada pekerjaan mental (bukan manual) dan mensyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya. Pekerjaan ini membutuhkan penguasaan pengetahuan teoretis sebagai instrumen untuk melakukan pekerjaan praktis.
- c. Makna Sosiologi: Dalam sudut pandang sosiologi, profesi menunjukkan adanya suatu kepercayaan (kredibilitas) yang diberikan masyarakat kepada seseorang atas keahliannya dalam suatu urusan atau pekerjaan tertentu.

Para ahli juga memberikan beragam definisi. Sanusi et al. (dalam Udin S. Saud, 2009) mendefinisikan profesi sebagai jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya, yang berarti tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih secara khusus. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017)

juga menegaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang menuntut kompetensi khusus melalui proses pendidikan yang lama pada jenjang pendidikan tinggi, serta mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan imbalan yang layak untuk kehidupannya. Jabatan guru, secara tegas, merupakan salah satu jabatan profesi. Penegasan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional ini berfungsi untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

1.2. Ciri-ciri Profesi Guru

Tidak semua pekerjaan dapat disebut sebagai profesi. Sebuah profesi memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus yang membedakannya dari pekerjaan biasa. National Education Association (NEA) di Amerika Serikat merumuskan ciri-ciri sebuah profesi sebagai berikut:

- a. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual.
- b. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu pengetahuan yang khusus.
- c. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama.
- d. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan (*continuing professional development*).

- e. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
- f. Jabatan yang menentukan standarnya sendiri.
- g. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- h. Jabatan yang mempunyai organisasi profesi yang kuat dan terjalin erat.

Ambarawati (2020), juga menambahkan beberapa ciri lain, yaitu memerlukan kegiatan intelektual yang tinggi, memiliki kualifikasi tertentu, dan memiliki kode etik yang mengatur anggotanya. Meskipun ciri-ciri tersebut berlaku umum, profesi guru memiliki kekhususan, yakni terletak pada karakternya sebagai sosok insan yang patut dicontoh dan diteladani, yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan guru sebagai sebuah profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memerlukan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan intensif.
- b. Memerlukan pendidikan tinggi yang membutuhkan waktu relatif lama.
- c. Memiliki standar kerja (aturan) yang baku dan jelas tentang hal yang dikerjakannya.
- d. Memiliki lembaga pendidikan khusus (LPTK) yang mencetak tenaga profesi yang dibutuhkan.
- e. Tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- f. Memiliki otonomi dalam melaksanakan tugas profesinya.

- g. Memiliki organisasi profesi yang memperjuangkan hak-hak anggotanya serta bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas profesi.
- h. Mendapat pengakuan dan dibutuhkan oleh masyarakat.
- i. Memiliki sistem imbalan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- j. Memiliki jenjang karier yang jelas dalam jangka panjang.
- k. Memiliki Kode Etik yang mengatur setiap anggota profesinya.

Penetapan guru sebagai profesi bertujuan mulia, di antaranya untuk mengangkat martabat guru, menjamin hak dan kewajibannya, meningkatkan kompetensi, memajukan karier, serta meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan nasional secara keseluruhan.

1.3. Profesional dan Profesionalisme

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan erat dengan profesi, yaitu profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi.

- Profesional adalah sebutan untuk orang yang menyandang suatu profesi dan juga sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai profesinya.
- Profesionalisme adalah paham yang menekankan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional.
- Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas dan derajat keahlian yang dimiliki seseorang.
- Profesionalisasi adalah proses peningkatan kualifikasi dan kompetensi anggota profesi melalui pendidikan dan pelatihan.

Seorang guru profesional adalah individu yang sangat mampu melakukan pekerjaannya. Secara formal, guru profesional adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Artinya, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memenuhi standar tersebut.

Kompetensi profesional seorang guru mencakup penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, serta penguasaan konsep dan metode keilmuan yang relevan. Profesionalitas ini menuntut guru untuk memiliki kemampuan (*competency*) dalam tiga bidang utama:

- a. Penguasaan disiplin ilmu (*subject matter*) yang akan diajarkan.
- b. Penguasaan cara mengajarkannya (*teaching methodology*).
- c. Pemahaman terhadap anak didik (*educational psychology*).

Baskoro Poedjinogroho menambahkan bahwa guru profesional adalah guru yang mengenal dirinya sebagai pribadi yang terpenggil untuk mendampingi peserta didik dalam belajar. Ia tidak menyalahkan siswa atas kegagalan, melainkan terpenggil untuk menemukan penyebab dan mencari jalan keluar bersama.

Guru Profesionalisme lebih dari sekadar menyandang status profesional. Profesionalisme adalah sikap mental dan komitmen dari para anggota profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Ini adalah keyakinan seorang guru untuk melayani peserta didik secara optimal demi menumbuhkan seluruh potensi mereka.

Seorang guru yang memiliki jiwa profesionalitas tinggi akan menunjukkan indikator-indikator berikut:

- a. Ikhlas dan bangga atas profesi yang disandangnya.
- b. Selalu berupaya meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.
- c. Bekerja sungguh-sungguh tanpa harus diawasi.
- d. Menjaga nama baik diri dan profesinya.
- e. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.
- f. Aktif dalam organisasi profesi.
- g. Berpikir jauh untuk masa depan peserta didiknya.
- h. Bersyukur atas imbalan yang diperoleh.

Komitmen pada proses belajar siswa, penguasaan materi, kemampuan berpikir sistematis, dan menjadi bagian dari masyarakat pembelajar adalah ciri-ciri yang melekat pada guru profesional.

1.4. Prinsip-prinsip Profesi Guru

Untuk memastikan bahwa jabatan guru dijalankan dengan standar kualitas yang tinggi, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, Pasal 7, menetapkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.

- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan yuridis dan moral bagi setiap guru dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa menjadi guru bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah pengabdian yang menuntut totalitas, komitmen, dan pengembangan diri yang tiada henti demi kemajuan pendidikan bangsa

BAB 2

HAKIKAT DAN PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN VOKASI

Setelah memahami konsep dasar profesi guru pada bab sebelumnya, kini kita akan mendalami hakikat dari bidang yang menjadi lahan pengabdian utama seorang guru kejuruan, yaitu Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK) atau yang lebih umum dikenal sebagai pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi menempati posisi yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa, karena ia secara langsung menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Bab ini akan mengupas secara mendalam mengenai definisi dan filosofi yang melandasinya, tujuan yang ingin dicapai, serta peran krusialnya dalam pembangunan SDM dan perekonomian nasional.



Gambar 2. Peran strategis pendidikan vokasi

2.1. Definisi dan Filosofi Pendidikan Vokasi (PTK)

Pendidikan teknologi dan kejuruan (PTK) merupakan sebuah sistem pendidikan yang memiliki penekanan dan tujuan yang khas, berbeda dari pendidikan umum. Definisi Pendidikan Vokasi Secara konseptual, terdapat perbedaan antara pendidikan teknologi dan pendidikan kejuruan. Pendidikan teknologi berfokus pada pengajaran penggunaan teknologi untuk memecahkan masalah dalam memenuhi berbagai kebutuhan, dengan landasan utamanya adalah keterampilan pemecahan masalah. Sementara itu, pendidikan kejuruan lebih berkaitan dengan keterampilan (*skill*) dalam menggunakan alat dan mesin. Pendidikan teknologi mencakup pengetahuan umum, teoritis, dan pengembangan bakat kreatif, sedangkan pendidikan kejuruan berfokus pada pengetahuan khusus, praktis, dan penyiapan untuk bekerja. Dalam praktiknya, kedua konsep ini disinergikan untuk meningkatkan relevansi pendidikan.

Di tingkat global, UNESCO-UNEVOC mendefinisikan Pendidikan Teknologi dan Vokasi dan Pelatihan (TVET) sebagai pendidikan yang mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bidang pekerjaan, produksi, jasa, dan mata pencaharian. TVET merupakan bagian dari pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) yang dapat berlangsung di tingkat menengah, pasca-menengah, hingga perguruan tinggi, dan mencakup pembelajaran berbasis kerja (*work-based learning*).

Di Indonesia, landasan hukum melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara jelas mendefinisikan pendidikan kejuruan. Pada pasal 15, disebutkan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang

mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang khusus/tertentu. Definisi serupa juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990. Berdasarkan UU Sisdiknas, pendidikan pada jenjang menengah disebut sebagai pendidikan kejuruan (SMK), sementara pada jenjang pendidikan tinggi disebut sebagai pendidikan vokasi (misalnya politeknik atau program diploma). Secara esensial, hakikat pendidikan vokasi dapat disimpulkan sebagai pendidikan untuk dunia kerja (*education-for-work*). Tujuannya adalah mengembangkan keterampilan, kemampuan, pemahaman, sikap, dan kebiasaan kerja yang dibutuhkan oleh pekerja untuk memasuki dunia kerja dan meraih kemajuan dalam pekerjaan yang produktif. Pendidikan vokasi dirancang untuk menyiapkan individu agar dapat memperoleh pekerjaan yang menguntungkan, baik sebagai pekerja semi-terampil, terampil, teknisi, maupun sub-profesional.

Filosofi Pendidikan Vokasi Filosofi yang paling mendasar dan efektif untuk pendidikan vokasi adalah filosofi pragmatisme. Pragmatisme menekankan pada relevansi dan kegunaan praktis, di mana nilai sebuah pengetahuan ditentukan oleh kegunaannya dalam praktik. Kaum pragmatis tidak terjebak dalam perdebatan teoretis yang mandul, melainkan berusaha memecahkan masalah yang dihadapi dengan tindakan nyata dan konkrit. Filosofi ini sangat sesuai dengan prinsip pendidikan vokasi yang paling sederhana: "*pekerjaan apa yang dibutuhkan dan apa yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu*".

Prosser dan Quigley (1950) meyakini bahwa harus ada sekolah kejuruan sebagai pilihan bagi masyarakat untuk membantu peserta didik mendapatkan pekerjaan, bertahan dalam pekerjaan, dan maju dalam karier. Prinsip-prinsip yang dikemukakan Prosser menjadi

landasan penting dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi yang efektif, di antaranya:

- a. Lingkungan belajar harus dibuat semirip mungkin dengan lingkungan industri.
- b. Pelatihan harus menggunakan cara, alat, dan mesin yang sama dengan yang ada di tempat kerja.
- c. Guru atau instruktur harus memiliki pengalaman industri yang sukses (*craftsperson teacher*).
- d. Kebiasaan berpikir dan bekerja yang sesuai dengan dunia kerja harus dilatihkan secara berulang.

Dengan landasan filosofi ini, pendidikan vokasi tidak hanya menjadi relevan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan nyata di dunia kerja.

2.2. Tujuan Pendidikan Vokasi

Tujuan utama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai lembaga pendidikan vokasi adalah mempersiapkan peserta didik agar fokus untuk bekerja dalam bidang tertentu. Lulusannya diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti kebutuhan masyarakat, dunia kerja (industri), dan kebutuhan profesional.

Secara lebih rinci, tujuan penyelenggaraan SMK/pendidikan vokasi adalah:

- a. Menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik secara mandiri (berwirausaha) maupun mengisi lowongan pekerjaan di dunia usaha dan industri (DUDI) sebagai tenaga kerja tingkat menengah.
- b. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik.

- c. Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab, serta dapat menjalani kehidupan secara layak.
- d. Membekali peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam berkompetisi, serta mampu mengembangkan sikap profesional.
- e. Membekali peserta didik dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) agar mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan, termasuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, SMK tidak hanya mencetak lulusan yang memiliki keterampilan untuk menangani suatu pekerjaan tertentu, tetapi juga membentuk individu yang utuh dan siap menghadapi tantangan kehidupan.

2.3. Peran Pendidikan Vokasi dalam Pembangunan SDM

Pendidikan kejuruan memegang peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang terampil dan berkeahlian sesuai dengan kebutuhan zaman. Kualitas SDM merupakan faktor penentu produktivitas, dan negara-negara maju seperti Jerman dan Jepang memiliki produktivitas tinggi karena kualitas SDM-nya yang unggul, yang salah satunya dibentuk melalui sistem pendidikan vokasi yang kuat.

Peran strategis pendidikan vokasi dalam pembangunan SDM dan ekonomi bangsa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil Seiring pertumbuhan dunia usaha dan industri, tuntutan akan tenaga kerja terampil lulusan SMK terus meningkat.

Pendidikan vokasi diakui di semua negara sebagai lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan SDM terampil untuk dunia kerja. Menurut Shatakishvili (2021), tenaga kerja terampil sangat diperlukan karena:

- a. Terlibat langsung dalam proses produksi barang dan jasa.
 - b. Mendukung pertumbuhan industrialisasi suatu negara.
 - c. Mampu mengantisipasi persaingan global yang semakin ketat.
 - d. Mampu menguasai dan mengaplikasikan teknologi modern.
 - e. Meningkatkan produktivitas dan memperkuat pembangunan ekonomi negara.
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Bangsa Pendidikan vokasi adalah instrumen penting untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global. Dengan menghasilkan lulusan yang kompeten, SMK secara langsung berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas perusahaan dan daya saing nasional. Pemerintah pun menempatkan pembangunan SDM sebagai salah satu prioritas utama, di mana pendidikan vokasi menjadi ujung tombaknya untuk mewujudkan link and match antara dunia pendidikan dan industri.
3. Menjalankan Fungsi Pembangunan Nasional yang Multidimensi Selain peran ekonomi, Dardiri (2023), mengemukakan bahwa SMK memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung pembangunan nasional, yaitu:
- a. Sosialisasi: Mentransmisikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

- b. Kontrol Sosial: Mengontrol tingkah laku seperti kejujuran dan kedisiplinan.
- c. Seleksi dan Alokasi: Mempersiapkan, memilih, dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai tuntutan pasar kerja (*demand-driven*).
- d. Asimilasi dan Konservasi Budaya: Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
- e. Promosi Perubahan: Berfungsi sebagai pendorong perubahan demi perbaikan.

Dengan peran ganda sebagai agen akulturasi (adaptif terhadap perubahan) dan enkulturasi (membawa perubahan), pendidikan vokasi tidak hanya merespons kebutuhan saat ini tetapi juga bersifat antisipatif terhadap masa depan. Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan vokasi bukan sekadar "pabrik" tenaga kerja, melainkan sebuah ekosistem strategis yang membentuk fondasi bagi kemajuan SDM, ekonomi, dan peradaban bangsa.

BAGIAN IV

EKOSISTEM PENDUKUNG PROFESI

GURU VOKASI

BAB 11

PERAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN DI TINGKAT NASIONAL DAN INSTITUSI

Pengembangan profesionalitas seorang guru vokasi tidak terjadi dalam ruang hampa. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh ekosistem di sekelilingnya, mulai dari kebijakan di tingkat nasional hingga tata kelola di tingkat institusi tempatnya mengabdikan. Upaya peningkatan kompetensi yang hanya bertumpu pada inisiatif individu tanpa didukung oleh sistem yang kondusif akan sulit mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bab ini akan membahas bagaimana sistem di tingkat makro (kebijakan pemerintah) dan tingkat meso (manajemen institusi/sekolah) memegang peran vital dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, memfasilitasi, dan mendorong pengembangan guru vokasi secara sistematis.



Gambar 11. Ekosistem Pendukung profesi Guru Vokasi

11.1. Dukungan Kebijakan Nasional: Menciptakan Iklim yang Kondusif

Pemerintah memegang peran sentral dalam memberikan arah dan dukungan bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di tingkat nasional. Kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi menjadi fondasi bagi semua upaya pengembangan di tingkat bawah.

Komitmen Pembangunan SDM sebagai Prioritas Nasional Pemerintah Indonesia telah menempatkan pembangunan SDM sebagai salah satu prioritas utama. Dalam mewujudkan implementasi Asta cita (delapan program yang dicanangkan pemerintah saat ini sebagai wujud perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur), pemerintah fokus pada pembangunan SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Komitmen ini tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pentingnya menyambungkan institusi pendidikan dengan apa yang dibutuhkan di luar institusi, atau yang dikenal dengan prinsip *link and match*. Komitmen politik di tingkat tertinggi ini memberikan sinyal kuat bahwa pengembangan pendidikan vokasi, termasuk gurunya, adalah agenda strategis nasional.

Regulasi Khusus untuk Revitalisasi SMK Sebagai wujud komitmen tersebut, pemerintah telah menerbitkan kebijakan spesifik yang menjadi payung hukum bagi revitalisasi pendidikan vokasi. Salah satu yang paling fundamental adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah

Menengah Kejuruan. Inpres ini mengamanatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk bersinergi dalam mengangkat kualitas SMK. Secara eksplisit, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diinstruksikan untuk:

- a. Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*).
- b. Meningkatkan jumlah dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SMK.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha/industri.

Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman antara lima menteri (Kemdikbud, Kemristekdikti, Perindustrian, BUMN, dan Ketenagakerjaan) tentang pengembangan SMK berbasis kompetensi. Regulasi-regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi sekolah dan pemerintah daerah untuk merancang program pengembangan guru yang berorientasi pada industri.

Kewajiban Pemerintah dalam Pembinaan dan Anggaran Dukungan kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi juga menyangkut pembinaan dan alokasi anggaran. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas menyatakan bahwa guru berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya. Lebih dari itu, pada Pasal 34, ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru serta wajib memberikan anggaran untuk itu. Kewajiban ini berlaku bagi

guru di sekolah negeri maupun swasta. Amanat ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur berbagai mekanisme Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), termasuk hak guru untuk mengambil cuti studi hingga 6 bulan untuk pemagangan di DUDI dengan tetap memperoleh gaji penuh. Kejelasan regulasi mengenai anggaran dan hak-hak guru selama pengembangan diri ini sangat krusial untuk memastikan program dapat berjalan tanpa membebani guru secara finansial. Selain itu, kebijakan untuk menyederhanakan beban administrasi guru juga menjadi penting agar waktu dan energi guru dapat lebih terfokus pada inovasi pembelajaran.

11.2. Pendekatan Ekologis: Sinergi di Berbagai Tingkatan

Untuk memahami bagaimana pengembangan guru dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan, kita perlu mengadopsi sebuah pendekatan ekologis. Pendekatan ini memandang pertumbuhan profesional guru bukan sebagai hasil dari satu faktor tunggal, melainkan sebagai hasil dari upaya bersama yang saling terhubung dan saling bergantung di berbagai tingkatan: nasional/internasional, institusional, dan individu.



Gambar 11.a Pendekatan ekologis pengembangan profesional guru

- Tingkat Nasional/Internasional (*Level Makro*): Pada level ini, pemerintah dan organisasi internasional (seperti UNESCO) menetapkan kebijakan, standar, dan dukungan pendanaan. Kebijakan seperti Inpres Revitalisasi SMK dan standar kompetensi guru adalah contoh upaya di tingkat makro yang menciptakan lingkungan pendukung.
- Tingkat Institusional (*Level Meso*): Institusi pendidikan (SMK) berperan sebagai agen yang menerjemahkan kebijakan makro menjadi program nyata. Manajemen sekolah merancang program PKB, menjalin kemitraan dengan industri, dan menciptakan iklim kerja yang mendukung. Institusi menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan praktik guru di kelas.
- Tingkat Individu (*Level Mikro*): Pada level ini, terletak motivasi, komitmen, dan upaya pribadi dari setiap guru. Guru sebagai pembelajar sepanjang hayat memiliki kewajiban moral untuk secara mandiri terus meningkatkan kompetensinya.

Ketiga level ini tidak berjalan secara linier, melainkan bersifat relasional dan multidireksional. Kebijakan nasional yang baik akan memfasilitasi program di tingkat institusi, yang pada gilirannya akan memotivasi guru secara individu. Sebaliknya, keberhasilan dan tantangan yang dihadapi di tingkat individu dan institusi harus menjadi umpan balik untuk menyempurnakan kebijakan di tingkat nasional. Sinergi antara ketiga level inilah yang akan menciptakan ekosistem pengembangan guru yang sehat dan berkelanjutan.

11.3. Peran Manajemen Institusi (Sekolah): Dari Kebijakan ke Aksi

Jika kebijakan nasional adalah kerangka besarnya, maka manajemen di tingkat institusi atau sekolahlah yang menjadi motor penggerak yang mengubah kebijakan menjadi aksi nyata. Kepala sekolah dan tim manajemennya memegang tanggung jawab krusial dalam menciptakan lingkungan di mana guru dapat berkembang secara profesional.

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di era otonomi daerah, paradigma tata kelola pendidikan bergeser ke arah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS memberikan kewenangan dan kekuasaan yang lebih luas bagi sekolah untuk mengembangkan dan mengelola kegiatannya sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhannya. Ciri-ciri sekolah yang berhasil menerapkan MBS antara lain:

- a. Meningkatnya peran serta komite sekolah dan masyarakat (DUDI).
- b. Program sekolah disusun dengan mengutamakan kepentingan proses belajar-mengajar.
- c. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
- d. Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme personil sekolah.

Tanggung Jawab Konkret Manajemen Sekolah Dalam kerangka MBS dan untuk mendukung pengembangan guru vokasi, manajemen sekolah memiliki beberapa tanggung jawab utama:

- a. Merencanakan dan Menganggarkan Program PKB: Kepala sekolah bertanggung jawab untuk merencanakan dan

melaksanakan program magang bagi guru produktif. Ini berarti sekolah harus secara proaktif menjalin kerjasama dengan DUDI dan mengalokasikan anggaran dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk program magang guru.

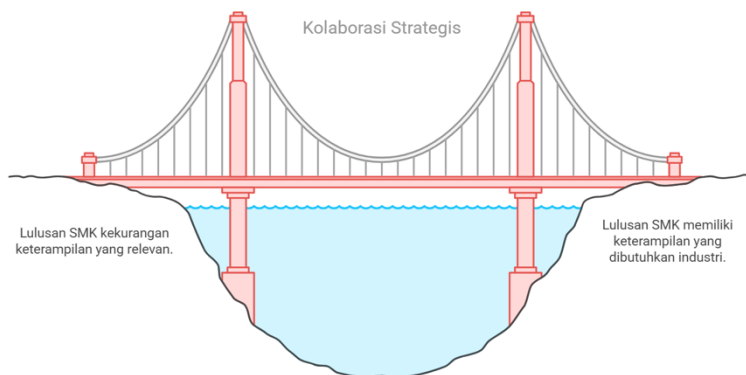
- b. Menciptakan Iklim Kerja yang Inovatif: Pengelola pendidikan harus merespons kebijakan dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Manajemen sekolah harus mendorong iklim kerja yang memungkinkan guru untuk berinovasi. Ini termasuk memberikan otonomi kepada guru, mendukung upaya-upaya kreatif, dan menyelenggarakan kegiatan pembinaan internal seperti diskusi dengan rekan sejawat dan rapat dinas yang konstruktif.
- c. Mengadopsi Teknologi dan Konsep *Smart Campus*: Di era digital, manajemen yang visioner harus mampu mengadopsi teknologi untuk meningkatkan layanan. Konsep *Smart Campus* atau kampus pintar adalah wujud integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam semua aspek layanan akademik dan administratif. Penerapan sistem seperti *e-learning*, *digital library*, dan manajemen akademik berbasis aplikasi akan memperkuat efisiensi dan produktivitas institusi.
- d. Menjalinkan Kemitraan Strategis: Kepala sekolah dan manajemennya menjadi garda terdepan dalam menjalin Nota Kesepahaman (MoU) atau kerjasama dengan DUDI. Kemitraan ini tidak hanya untuk magang guru, tetapi juga untuk penyelarasan kurikulum, guru tamu, dan sertifikasi kompetensi.

Dengan demikian, peran manajemen institusi sangatlah vital. Merekalah yang menjadi fasilitator, organisator, dan motivator di tingkat sekolah, memastikan bahwa dukungan dari tingkat nasional dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh setiap guru dalam upaya pengembangan profesionalitasnya.

BAB 12

KOLABORASI STRATEGIS DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI

Jika kebijakan dan tata kelola internal menjadi fondasi pendukung dari dalam, maka kolaborasi strategis dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) adalah napas kehidupan yang menghubungkan pendidikan vokasi dengan dunia nyata. Kemitraan ini bukan sekadar pelengkap, melainkan jantung dari seluruh ekosistem pendidikan kejuruan. Tanpa jalinan yang erat dengan industri, SMK berisiko menjadi menara gading yang menghasilkan lulusan dengan keterampilan usang dan tidak relevan. Bab ini akan menegaskan kembali urgensi konsep link and match sebagai masalah utama yang harus diatasi dan membahas secara mendalam berbagai bentuk kolaborasi yang harus dibangun dan dipelihara untuk memastikan pendidikan vokasi selalu sejalan dengan denyut nadi dunia kerja.



Gambar 12. Jembatan Kolaborasi

12.1. Urgensi *Link and Match*: Menjembatani Kesenjangan

Kronis

Salah satu masalah paling mendasar dan kronis yang dihadapi pendidikan kejuruan di Indonesia adalah masih terjadinya kesenjangan (gap) antara dunia pendidikan dengan DUDI. Data BPS tahun 2015 bahkan secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu masalah utama adalah pendidikan kejuruan (SMK) yang belum *link-and-match* dengan DUDI. Fenomena ini berarti apa yang diajarkan di sekolah seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, yang pada akhirnya berkontribusi pada angka pengangguran lulusan SMK.

Di era Revolusi Industri 4.0, urgensi untuk mewujudkan *link and match* yang sesungguhnya menjadi semakin mendesak. Revolusi ini telah mengubah konsep, struktur, dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja secara fundamental. Permintaan akan profesional dengan kompetensi yang jauh berbeda dari era sebelumnya telah memicu fokus pada transformasi bisnis ke platform digital. Dalam konteks ini, pendidikan kejuruan harus menjadi *demand-driven*, yaitu berorientasi pada permintaan dan kebutuhan pasar kerja, bukan lagi bersifat *supply-driven* atau hanya berorientasi pada pasokan lulusan.

Pemerintah Indonesia sangat menyadari urgensi ini. Komitmen untuk "menyambungkan institusi pendidikan dengan apa yang dibutuhkan di luar institusi" menjadi salah satu prioritas utama. Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan strategis seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Salah satu amanat utama dari Inpres ini adalah menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link*

and match). Kebijakan ini diperkuat dengan Nota Kesepahaman 5 Menteri dan Permen Perindustrian Nomor 3/2017 yang secara spesifik mengatur pengembangan SMK berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri.

Dengan demikian, kolaborasi strategis dengan DUDI bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan pendidikan vokasi dapat menjalankan peran strategisnya dalam menyiapkan SDM yang kompeten, relevan, dan berdaya saing di tengah persaingan global.

12.2. Bentuk-Bentuk Kolaborasi Strategis

Kemitraan antara SMK dan DUDI harus diwujudkan dalam berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa bentuk kolaborasi strategis yang menjadi kunci keberhasilan *link and match*.

1. **Penyelarasan Kurikulum** Ini adalah bentuk kolaborasi yang paling fundamental. Kurikulum SMK tidak boleh disusun secara sepihak oleh dunia pendidikan, melainkan harus melibatkan DUDI secara aktif. Substansi pelajaran dalam pendidikan kejuruan harus selalu mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan lapangan kerja. Keterlibatan DUDI memastikan bahwa materi, struktur, dan orientasi pembelajaran benar-benar relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan di tempat kerja. Berdasarkan hasil kajian, peran DUDI dalam penyusunan kurikulum di SMK sudah mulai berjalan, meskipun tingkat keterlibatannya masih perlu ditingkatkan. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa perusahaan/industri adalah pihak yang paling banyak dilibatkan (sekitar 47%-51%), diikuti oleh asosiasi industri

(sekitar 19%-26%), asosiasi profesi (sekitar 15%-16%), dan alumni (sekitar 6%-14%). Kolaborasi dalam pengembangan kurikulum ini menjadi landasan bagi bentuk-bentuk kerjasama lainnya.

2. Mendatangkan Praktisi sebagai Pengajar (Guru Tamu)
Untuk memperkaya wawasan dan memberikan perspektif dunia kerja yang otentik kepada siswa, sekolah perlu secara rutin mengundang praktisi dari industri untuk mengajar di kelas. Meskipun istilah "guru tamu" tidak secara eksplisit disebutkan dalam semua sumber, esensinya sangat relevan dengan filosofi pendidikan kejuruan. Prinsip *craftsperson teacher* dari Prosser menegaskan bahwa pengajaran vokasi akan efektif jika diajarkan oleh seseorang yang memiliki pengalaman sukses di industri. Dengan mendatangkan para ahli dari industri, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mendapatkan gambaran nyata tentang budaya kerja, tantangan di lapangan, dan aplikasi praktis dari ilmu yang mereka pelajari. Kehadiran praktisi juga dapat menginspirasi dan memotivasi siswa, serta membantu guru tetap terhubung dengan perkembangan terbaru di industrinya.
3. Magang Guru dan Siswa Program magang adalah wujud nyata dari pembelajaran berbasis dunia kerja (*Work-Based Learning*).
 - Untuk Siswa: Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Pendidikan Sistem Ganda (PSG) adalah komponen wajib dan krusial dalam kurikulum SMK. Melalui program ini, siswa mendapatkan pengalaman kerja langsung yang sarat nilai, menerapkan teori yang dipelajari, dan

membangun kebiasaan berpikir serta bekerja sesuai standar industri.

- Untuk Guru: Program magang industri adalah salah satu bentuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang paling efektif bagi guru produktif. Magang di industri memungkinkan guru untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan teknisnya, memahami kebutuhan DUDI secara langsung, dan mendapatkan pengalaman nyata yang akan memperkaya wawasan kejuruannya. Sayangnya, data menunjukkan bahwa keterlibatan guru produktif dalam program magang industri masih rendah, rata-rata kurang dari 25%. Padahal, respons guru terhadap program ini sangat positif, di mana 89% kepala sekolah menyatakan guru bersemangat untuk mengikuti magang jika diprogramkan.
4. Penelitian dan Pengembangan Bersama (R&D) Ini adalah bentuk kolaborasi tingkat lanjut yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kemitraan ini dapat berupa:
- Proyek Riset Terapan: Sekolah dan industri dapat bekerja sama dalam proyek penelitian dan pengembangan (R&D) untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi industri. Siswa dan guru dapat terlibat dalam proyek ini, memberikan mereka pengalaman riset yang berharga sekaligus memberikan solusi inovatif bagi perusahaan.
 - Riset tentang Reformasi Pendidikan: Kolaborasi juga dapat berbentuk riset bersama untuk mengkaji isu-isu kunci dan tantangan dalam reformasi pendidikan

kejuruan, yang hasilnya dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan dan praktik.

5. Sertifikasi Kompetensi Sertifikasi adalah pengakuan formal atas kompetensi kerja seseorang. Kolaborasi dalam bidang ini sangat penting untuk memastikan lulusan SMK memiliki kualifikasi yang diakui oleh dunia kerja.

- Uji Kompetensi Lulusan: SMK perlu bekerja sama dengan DUDI dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi siswanya. Sertifikat kompetensi ini memberikan kepastian bagi pemegangnya mengenai kualitas dan kredibilitasnya, serta menjadi nilai tambah yang signifikan di pasar kerja.
- Sertifikasi bagi Guru: Idealnya, para guru produktif SMK juga harus memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau sertifikat sebagai asesor kompetensi. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas guru sebagai pelatih yang mampu menyiapkan siswanya untuk mengikuti uji kompetensi standar industri.

Kolaborasi strategis dengan DUDI adalah sebuah proses dinamis yang harus terus dipelihara. Ini bukan sekadar penandatanganan MoU, melainkan sebuah kemitraan hidup yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata. Dengan menjalankan bentuk-bentuk kolaborasi ini secara konsisten, pendidikan vokasi dapat benar-benar menjadi jembatan yang kokoh antara dunia belajar dan dunia kerja, menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap beradaptasi dan berinovasi di masa depan.

BAB 13

ETIKA PROFESI DAN PERAN ORGANISASI GURU

Sebuah profesi yang luhur tidak hanya ditopang oleh keahlian dan kompetensi teknis, tetapi juga oleh landasan moral yang kokoh dan wadah kolektif yang kuat. Bagi guru, landasan moral ini terwujud dalam Kode Etik Guru Indonesia, yang berfungsi sebagai kompas dalam bersikap dan berperilaku. Sementara itu, wadah kolektifnya adalah organisasi profesi, yang menjadi benteng untuk melindungi, mengembangkan, dan memperjuangkan aspirasi para anggotanya. Bab ini akan membahas secara mendalam pentingnya kode etik sebagai pedoman moral serta peran strategis organisasi guru dalam menjaga martabat dan memajukan profesionalisme guru di Indonesia.



Gambar 13. Landasan Organisasi Profesi Guru

13.1. Kode Etik Guru Indonesia: Pedoman Moral dan Perilaku Profesional

Salah satu ciri utama dari sebuah profesi adalah adanya kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, serta cara kerja para anggotanya. Kode etik ini berfungsi sebagai penangkal dari kecenderungan penyimpangan dan menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa profesi tersebut akan dijalankan dengan standar moral yang tinggi.

Pengertian dan Fungsi Kode Etik Kode Etik Guru Indonesia didefinisikan sebagai norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru di Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Landasan hukum pembentukannya tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengamanatkan bahwa organisasi profesi guru membentuk kode etik untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru. Kode etik memiliki beberapa fungsi krusial:

1. Menjunjung Tinggi Martabat Profesi: Menempatkan guru sebagai profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.
2. Menjaga Kesejahteraan Anggota: Menjadi landasan dalam memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para guru.
3. Meningkatkan Pengabdian dan Mutu Profesi: Berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku dalam

menunaikan pengabdian, sehingga dapat meningkatkan mutu layanan profesional guru.

4. Sebagai Alat Kontrol dan Perlindungan: Kode etik menjadi alat kontrol bagi semua anggota profesi dan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi guru dari praktik yang tidak adil maupun bagi masyarakat dari layanan yang tidak kompeten.
5. Sebagai Dasar Pemberian Sanksi: Menjadi acuan bagi Dewan Kehormatan Guru Indonesia dalam memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.

Isi dan Nilai-nilai Pokok Kode Etik Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari nilai-nilai agama dan Pancasila, nilai-nilai kompetensi guru, serta nilai-nilai jati diri dan harkat martabat manusia. Isi dari kode etik ini mengatur secara rinci pedoman sikap dan perilaku guru dalam hubungannya dengan berbagai pihak:

- a. Hubungan Guru dengan Peserta Didik: Guru wajib berperilaku profesional, membimbing siswa untuk memahami hak dan kewajibannya, menjalin hubungan yang dilandasi kasih sayang, serta menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik. Guru juga harus menjunjung tinggi harga diri siswa, bertindak adil, dan tidak membuka rahasia pribadi siswa untuk alasan yang tidak berkaitan dengan kepentingan pendidikan.
- b. Hubungan Guru dengan Orang Tua/Wali Siswa: Guru berkewajiban membina hubungan kerja sama yang efektif dan efisien dengan orang tua/wali. Guru harus

memberikan informasi yang jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik serta memotivasi orang tua/wali untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

- c. Hubungan Guru dengan Masyarakat: Guru harus menjalin komunikasi dan kerja sama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan pendidikan. Guru juga dituntut peka terhadap perubahan yang terjadi dan berperan aktif bersama masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan peserta didik.
- d. Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat: Guru wajib memelihara dan meningkatkan kinerja serta reputasi sekolah. Terhadap rekan sejawat, guru harus saling menghormati, saling membimbing, dan menjaga suasana kekeluargaan. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan keliru atau melakukan tindakan yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya.
- e. Hubungan Guru dengan Profesi: Guru harus menjunjung tinggi jabatannya sebagai sebuah profesi, terus-menerus meningkatkan kompetensinya, dan tidak boleh melakukan tindakan yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
- f. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya: Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi dan berperan aktif dalam melaksanakan program-programnya. Guru harus menjunjung tinggi martabat dan eksistensi organisasi profesinya serta tidak boleh

menyatakan keluar dari keanggotaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- g. Hubungan Guru dengan Pemerintah: Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan di bidang pendidikan sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Guru juga wajib membantu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

13.2. Peran Organisasi Profesi Guru: Wadah Kolektif Profesionalisme

Salah satu ciri dari sebuah profesi yang matang adalah memiliki organisasi profesi yang kuat dan terjalin erat. Organisasi profesi adalah wadah bagi para anggotanya untuk bersatu, berkomitmen, dan berjuang bersama mencapai tujuan bersama.

Hakikat dan Fungsi Organisasi Profesi Organisasi profesi guru adalah organisasi yang bersifat nirlaba dan mandiri (*independen*), yang dibentuk untuk menghimpun semua anggotanya dalam upaya menjaga eksistensi profesi, meningkatkan kompetensi, dedikasi, kesejahteraan, dan perlindungan. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 secara tegas mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Di Indonesia, terdapat berbagai organisasi profesi guru, baik yang bersifat umum maupun spesifik. Beberapa contohnya antara lain:

- Organisasi Umum: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

- Organisasi Spesifik: Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Ikatan Guru Vokasi Indonesia (IGVI).

Sesuai amanat undang-undang, organisasi profesi guru memiliki fungsi untuk:

1. Memajukan Profesi: Mengangkat citra, harkat, dan martabat guru.
2. Meningkatkan Kompetensi dan Karier: Menjadi wadah peningkatan kompetensi dan wawasan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan lokakarya.
3. Memberikan Perlindungan Profesi: Memberikan perlindungan dari tindak kekerasan, perlakuan tidak adil, atau pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai aturan.
4. Meningkatkan Kesejahteraan: Memperjuangkan kesejahteraan anggota agar dapat menjalankan tugas profesi sebagaimana mestinya.
5. Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat: Menjadi sarana bagi guru untuk mendedikasikan diri kepada sesama anggota dan masyarakat luas.

Kewenangan Organisasi Profesi dan Peran Dewan Kehormatan Untuk dapat menjalankan fungsinya, organisasi profesi guru diberikan beberapa kewenangan oleh negara, yaitu:

- Menetapkan dan Menegakkan Kode Etik Guru: Ini adalah kewenangan paling fundamental yang menjadi landasan moral bagi seluruh anggota.

- Memberikan Bantuan Hukum kepada Guru: Memberikan advokasi dan pendampingan hukum bagi guru yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugasnya.
- Memberikan Perlindungan Profesi Guru: Melindungi anggota dari pelecehan terhadap profesi atau pembatasan yang dapat menghambat tugas guru.
- Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru: Menyelenggarakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota.
- Memajukan Pendidikan Nasional: Berperan aktif dalam memberikan masukan dan gagasan untuk kemajuan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Dalam menegakkan kode etik, organisasi profesi guru membentuk sebuah badan khusus yang disebut Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Dewan ini bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh guru. Rekomendasi sanksi dari Dewan Kehormatan ini wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru sebagai upaya pembinaan dan untuk menjaga harkat serta martabat profesi.

Dengan adanya kode etik sebagai landasan moral dan organisasi profesi sebagai wadah perjuangan kolektif, profesi guru memiliki dua pilar yang kokoh untuk terus tumbuh, berkembang, dan menjaga kehormatannya di tengah masyarakat.

BAGIAN V

BEYOND VOKASI - MASA DEPAN

PROFESI GURU KEJURUAN

BAB 14

TEACHERPRENEUR DAN PERAN BARU GURU SEBAGAI INOVATOR

Setelah menjelajahi berbagai kompetensi dan ekosistem pendukung yang membentuk guru vokasi modern, kita kini tiba pada sebuah visi yang melampaui batas-batas ruang kelas tradisional. Di era disrupsi, menjadi guru yang kompeten saja tidak lagi cukup. Tuntutan zaman memanggil para pendidik, khususnya di bidang vokasi, untuk melangkah lebih jauh menjadi seorang inovator, pemimpin perubahan, dan bahkan seorang wirausahawan di bidangnya. Bab ini akan memperkenalkan konsep *teacherpreneur*, sebuah paradigma baru yang melihat guru sebagai agen perubahan yang proaktif. Kita akan membahas evolusi peran guru dalam ekologi belajar yang baru dan mengeksplorasi bagaimana semangat kewirausahaan ini dapat diwujudkan melalui penciptaan produk dan jasa pendidikan yang inovatif.



Gambar 14. Evolusi Guru Vokasi

14.1. Konsep *Teacherpreneur*

Istilah *teacherpreneur* merujuk pada sebuah evolusi peran di mana guru tidak lagi hanya terbatas pada tugas mengajar di kelas, tetapi juga aktif memimpin perubahan dan mengembangkan inovasi dalam ekosistem pendidikan. Konsep ini menggambarkan sosok guru yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, yang mampu menyebarluaskan keahliannya kepada orang lain. Menurut Barnet Berry (2011), ciri-ciri seorang *teacherpreneur* adalah:

- a. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang cara mengajar.
- b. Memahami dengan jelas strategi yang harus dilakukan agar sekolah meraih kesuksesan yang tinggi.
- c. Memiliki keterampilan dan komitmen untuk menyebarluaskan keahliannya kepada orang lain.

Seorang *teacherpreneur* adalah bagian dari profesi guru yang melekat pada dirinya, namun ia memiliki visi untuk mengembangkan pendidikan terbaik bagi anak-anak di masa depan. Mereka adalah guru kelas yang juga menjadi konsultan bisnis, bekerja di sektor publik, dan mengembangkan kualitas profesinya melalui keterhubungan dengan dunia yang sangat luas. Peran ini sangat bergantung pada kebutuhan sekolah dan masyarakat, di mana mereka dapat berkontribusi sebagai pengembang kurikulum, mentor bagi guru lain, atau membangun pola-pola kerjasama antara sekolah dengan organisasi lain.

Penting untuk dipahami bahwa konsep *teacherpreneur* tidak dimaksudkan untuk mengkomersialkan pendidikan secara membabi buta. Ariel Sack mengingatkan bahwa peran guru adalah untuk mencintai anak-anak, bukan hanya sekadar mencari uang. Namun, paradigma ini membuka lahan bisnis yang dapat digali

guru dengan cara yang lebih elegan. Guru tidak lagi hanya bergantung pada gaji, tetapi dapat menciptakan nilai tambah melalui keahliannya. Prediksi pada tahun 2030 menunjukkan bahwa sekitar 4 juta guru akan berperan sebagai *teacherpreneur*, sebuah bukti bahwa evolusi peran ini adalah keniscayaan di masa depan.

14.2. Peran-peran Baru Guru di Era Digital

Munculnya konsep *teacherpreneur* didorong oleh pergeseran fundamental peran guru di era Revolusi Industri 4.0. Kemudahan akses informasi melalui internet telah mengubah posisi guru secara drastis. Peran guru tidak lagi bisa sebatas menjadi satu-satunya penyedia ilmu pengetahuan (*the provider of science*) atau hanya melakukan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*). Fungsi ini sebagian besar telah diambil alih oleh teknologi.

Peran terpenting pendidik yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin adalah sebagai penyampai nilai-nilai (*transfer of value*) dan pembentuk karakter. Dalam konteks ini, peran guru berevolusi menjadi lebih dinamis dan multifaset, sejalan dengan lahirnya ekologi belajar baru (*new learning ecology*) yang didorong oleh kemajuan teknologi digital. Beberapa peran baru guru yang krusial di era digital adalah:

1. Sebagai Inovator dan Agen Perubahan: Guru tidak lagi hanya menjalankan rutinitas, tetapi harus menjadi agen perubahan (*agent of change*). Mereka dituntut untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide-ide baru yang bermanfaat, sedangkan inovasi adalah proses mengimplementasikan ide kreatif tersebut menjadi produk atau layanan nyata yang dapat

mengubah dunia. Hanya dengan bersikap kreatif dan inovatif, guru akan memiliki keunikan dan berpotensi menjadi pemenang dalam persaingan.

2. Sebagai Fasilitator, Motivator, dan Inspirator: Dengan melimpahnya sumber belajar di internet, peran guru bergeser menjadi fasilitator yang membimbing siswa belajar dari berbagai sumber. Mereka juga menjadi motivator yang membangkitkan semangat belajar, dan inspirator yang menumbuhkan imajinasi dan kreativitas. Sebagai seorang inspirator (*inspiring teacher*), guru mampu menumbuhkan ilham bagi peserta didik untuk terus belajar, bahkan ketika guru tidak hadir secara fisik.
3. Sebagai Kreator dan Desainer (*Creator and Designer*): Di era digital, siswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen. Guru pun demikian. Mereka diberdayakan untuk menjadi kreator, desainer, pembangun, dan inovator TIK melalui berbagai platform. Guru tidak lagi hanya menerapkan kurikulum yang sudah jadi, tetapi secara aktif mendesain pengalaman belajar yang relevan, menantang, dan otentik bagi siswa.
4. Sebagai Peneliti (*Researcher*): Guru profesional dituntut untuk selalu melakukan penelitian, misalnya melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK), untuk menemukan masalah, menganalisis, sekaligus melakukan perbaikan dalam pembelajarannya. Peran sebagai peneliti memungkinkan guru untuk mengkaji praktiknya secara sistematis dan belajar dari pengalaman, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pengajaran. Konsep

teacherpreneur juga mencakup peran guru sebagai peneliti yang mampu menjual kecerdasan dan idenya.

Peran-peran baru ini saling terkait dan membentuk profil guru modern yang tidak hanya mengajar, tetapi juga memimpin, menciptakan, dan terus belajar dalam sebuah ekosistem pembelajaran yang dinamis dan terhubung secara global.

14.3. Wujud Inovasi: Menciptakan Produk dan Jasa Pendidikan

Semangat *teacherpreneurship* dan peran sebagai inovator tidak berhenti pada tataran konsep. Ia harus diwujudkan dalam bentuk karya nyata yang memberikan nilai tambah bagi dunia pendidikan. Guru vokasi, dengan keahlian praktis yang mereka miliki, berada di posisi yang sangat strategis untuk menciptakan berbagai produk dan jasa pendidikan. Beberapa wujud inovasi yang dapat dikembangkan oleh guru vokasi antara lain:

- **Pengembangan Produk Pendidikan Fisik dan Digital:** Seorang guru *teacherpreneur* dapat mengembangkan berbagai produk pendidikan seperti media pembelajaran, buku, modul, alat laboratorium, dan perangkat pembelajaran lainnya. Di era digital, produk ini dapat berupa modul digital, media pembelajaran interaktif, video pembelajaran, animasi, hingga aplikasi pendidikan berbasis smartphone. Kehadiran *e-commerce* pendidikan seperti Ruangguru, yang menyediakan kelas virtual dan video belajar, adalah bukti nyata bagaimana inovasi digital dapat mentransformasi layanan pendidikan.
- **Menjadi Konsultan dan Penyedia Pelatihan:** Dengan kepakaran yang dimiliki, guru dapat menjual keahliannya dengan menjadi narasumber atau tenaga ahli di berbagai forum. Mereka dapat merancang dan menawarkan platform

atau program pelatihan khusus, baik untuk sesama guru, siswa, maupun masyarakat umum. Prediksi bahwa 600.000 guru kelas akan menjadi konsultan bisnis pada tahun 2030 menunjukkan betapa besar potensi di bidang ini.

- Pengembangan Platform dan Konten Kreatif: Guru dapat berpartisipasi dalam industri kreatif di bidang pendidikan, menjadi konsultan dalam pembuatan game online edukatif, atau mengembangkan web dan produksi "*edutainment*" personal. Mereka dapat menciptakan platform yang menghubungkan antara dunia sekolah dengan kebutuhan industri, atau mengembangkan konten yang relevan dengan perkembangan teknologi terbaru.

Setiap inovasi yang diciptakan haruslah berorientasi pada kebutuhan pasar (*market oriented*). Artinya, produk atau jasa yang dihasilkan harus mampu menjawab permasalahan nyata dan memberikan manfaat yang jelas bagi penggunanya. Dengan merangkul jiwa *teacherpreneur*, guru vokasi tidak hanya meningkatkan profesionalismenya, tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam membentuk masa depan pendidikan yang lebih relevan, dinamis, dan berdaya saing.

BAB 15

VISI MASA DEPAN: GURU VOKASI INDONESIA



Gambar 15. Visi Masa Depan Guru vokasi

Kita telah menempuh sebuah perjalanan panjang melalui bab-bab sebelumnya, mulai dari memahami hakikat profesi guru vokasi, menyelami gelombang disrupsi digital, memetakan kompetensi yang dibutuhkan, hingga membangun ekosistem pendukung yang kokoh. Kini, tibalah saatnya kita menyatukan semua gagasan tersebut ke dalam sebuah visi besar untuk masa depan. Bab penutup ini akan merangkum tantangan dan peluang

yang terbentang di hadapan kita, menegaskan kembali peran vital guru vokasi sebagai arsitek peradaban, dan diakhiri dengan sebuah panggilan tulus untuk bertindak bersama demi masa depan pendidikan vokasi dan kejayaan bangsa Indonesia.

15.1. Sintesis dan Kesimpulan: Transformasi sebagai Keniscayaan

Perjalanan kita dalam buku ini diawali dengan pemahaman bahwa era yang kita hadapi adalah era perubahan radikal. Era disrupsi yang didorong oleh Revolusi Industri 4.0 telah mengubah tatanan sistem lama dan menciptakan paradigma baru dalam hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia kerja dan pendidikan. Perubahan ini bukanlah fenomena sesaat, melainkan sebuah keniscayaan yang harus disikapi agar kita tidak terlindas oleh zaman.

Bagi dunia pendidikan vokasi, era ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang fundamental:

- a. Tantangan Utama: Dunia kerja berubah secara drastis, menuntut kompetensi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Hal ini mempertajam masalah klasik pendidikan vokasi, yaitu kesenjangan antara dunia pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau masalah link and match. Guru dihadapkan pada pergeseran peran dari sekadar penyampai pengetahuan (*transfer of knowledge*) menjadi fasilitator dan penyampai nilai (*transfer of value*), karena fungsi transfer informasi sebagian besar telah diambil alih oleh internet. Jika tidak bertransformasi, peran guru berisiko kehilangan relevansinya.

- b. Peluang Besar: Di sisi lain, era digital membuka pintu inovasi yang sangat luas. Teknologi melahirkan model-model pembelajaran baru yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa, seperti blended learning dan pembelajaran berbasis proyek. Munculnya platform *e-commerce* pendidikan seperti Ruangguru menunjukkan potensi besar untuk mendemokratisasi akses terhadap pembelajaran berkualitas. Pemerintah pun telah menunjukkan komitmen kuat melalui berbagai kebijakan, seperti Inpres Revitalisasi SMK, yang menjadi landasan untuk memperkuat sinergi antara sekolah dan
- c. industri.

Dari dialektika antara tantangan dan peluang ini, satu kesimpulan utama dapat kita tarik: transformasi profesi guru vokasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Guru harus menjadi sosok yang adaptif, kreatif, inovatif, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*). Transformasi ini bukan hanya tentang penguasaan teknologi, tetapi juga tentang perubahan pola pikir (*mindset*) untuk menjadi pendidik yang mampu menyiapkan generasi untuk masa depan yang bahkan belum dapat kita bayangkan sepenuhnya.

15.2. Guru sebagai Arsitek Masa Depan: Menyongsong Indonesia Emas 2045

Masa depan suatu bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh kualitas gurunya. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah fakta yang tak terbantahkan. Dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, peran guru, khususnya guru vokasi, menjadi semakin strategis dan vital. Mereka bukan lagi

sekadar pelaksana kurikulum, melainkan adalah arsitek masa depan bangsa.

Metafora arsitek ini sangat tepat karena tugas guru adalah merancang dan membangun fondasi sumber daya manusia (SDM) yang akan menopang kemajuan bangsa. Pemerintah Indonesia telah menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama. Visi besar kita adalah Indonesia Emas 2045, di mana pada usia 100 tahun kemerdekaannya, Indonesia diharapkan menjadi negara yang maju, adil, dan makmur. Prediksi menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia, dengan kebutuhan tenaga kerja terampil mencapai 113 juta orang.

Kunci untuk mewujudkan visi besar ini terletak pada kemampuan kita memanfaatkan bonus demografi, yaitu periode di mana jumlah penduduk usia produktif mencapai puncaknya. Bonus ini bisa menjadi berkah jika SDM kita berkualitas, namun bisa menjadi bencana jika sebaliknya. Kualitas SDM inilah yang menjadi penentu, bukan sumber daya alam. Di sinilah peran guru vokasi menjadi sangat krusial. Merekalah ujung tombak pendidikan yang secara langsung bertugas menempa "Generasi Emas" tersebut. Tugas mereka melampaui pengajaran keterampilan teknis; mereka bertanggung jawab untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya—yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

Guru vokasi adalah para arsitek yang merancang, membentuk, dan membangun karakter serta kompetensi generasi yang akan menentukan nasib bangsa ini di panggung global. Keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas mulia ini akan

menjadi penentu apakah Indonesia Emas 2045 akan menjadi kenyataan atau sekadar impian.

15.3. Panggilan untuk Bertindak (Call to Action)

Mewujudkan visi besar ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan tidak bisa diemban oleh satu pihak saja. Ini adalah sebuah komitmen perubahan yang menuntut kerja bersama. Oleh karena itu, melalui bab penutup ini, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil peran dan berkomitmen dalam sebuah gerakan kolektif untuk mentransformasi pendidikan vokasi:

- a. Kepada Mahasiswa Calon Guru: Anda adalah masa depan dari profesi ini. Jangan pernah memandang profesi guru sebagai pilihan terakhir. Persiapkan diri Anda dengan sungguh-sungguh, tidak hanya dalam penguasaan ilmu, tetapi juga dalam membentuk karakter dan semangat sebagai pendidik sejati. Jadilah generasi guru yang sejak awal memiliki mindset sebagai inovator, fasilitator, dan teacherpreneur.
- b. Kepada Para Guru Vokasi: Anda adalah garda terdepan perubahan. Teruslah menjadi guru pembelajar yang tidak pernah berhenti mengasah diri. Rangkullah perubahan, beranilah keluar dari zona nyaman, dan jangan takut untuk berinovasi. Jadilah teladan yang menginspirasi, yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan karakter dan semangat juang kepada setiap peserta didik.
- c. Kepada Praktisi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI): Anda adalah mitra strategis yang tak tergantikan. Perkuat dan perdalam kemitraan Anda dengan SMK. Terlibatlah secara aktif dalam penyelarasan kurikulum, kirimkan para

ahli Anda sebagai guru tamu, dan bukalah pintu seluas-luasnya untuk program magang yang berkualitas bagi siswa dan, yang tak kalah penting, bagi para guru. Investasi Anda pada pendidikan vokasi adalah investasi untuk masa depan industri Anda sendiri dan masa depan bangsa.

- d. Kepada Para Pengambil Kebijakan (Pemerintah Pusat dan Daerah): Anda adalah arsitek ekosistem. Teruslah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Wujudkan janji untuk menyederhanakan beban administrasi guru agar energi mereka tercurah untuk inovasi pembelajaran. Pastikan alokasi anggaran untuk pengembangan guru vokasi memadai dan tepat sasaran. Implementasikan kebijakan revitalisasi secara konsisten dan berkelanjutan, serta fasilitasi sinergi yang lebih kuat antara dunia pendidikan dan dunia industri.

Perjalanan untuk melampaui vokasi menuju era baru yang gemilang adalah sebuah maraton, bukan sprint. Menuntut kesabaran, ketekunan, dan yang terpenting, kolaborasi dan komitmen bersama. Mari kita bergandengan tangan, mengubah paradigma, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat ekosistem pendidikan vokasi. Karena di tangan para guru vokasi yang profesional, berdaya, dan visioner, nasib Generasi Emas Indonesia 2045 dipertaruhkan. Mari kita wujudkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarawati, A. (2020). Reflecting Teacher Figure Through Personality. *Pedagogi Hayati*, 4(1), 19–29. <https://doi.org/10.31629/ph.v4i1.2274>
- Annim, S. K., Boah, M., Azupogo, F., Amporfro, D. A., Abada, L. A., ... WHO. (2017). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における
- Agraval, T., 2023, Vocational education and training programs (VET): An Asian perspective, *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education*, 14(1), 15-26
- Basuki, W. (2022). Manajemen pendidikan teknologi kejuruan dan vokasi. Bumi Aksara.
- Berger, L. (2008). *The Change Management Handbook: A Road Map to Corporate Transformation*. McGraw-Hill.
- Dardiri, A. (2023). Implikasinya Bagi Perbaikan Kualitas Output Dan Outcome. *Invotec*, 8(1), 1–19. <https://media.neliti.com/media/publications/66562-ID-membangun-citra-pendidikan-kejuruan-manf.pdf>
- Djarmiko, I. W., Siswanto, B. T., Sudira, P., Hamidah, & Widarto. (2013). Pendidikan teknologi dan kejuruan. Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fonna, N. (2019). Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang. Guepedia.
- Grollmann, P., & Rauner, F. (2021). TVET teachers: An endangered species or professional innovation agents? In P. Grollmann, & F. Rauner, (Eds.), *International perspectives on teachers and lecturers in technical and vocational education*. UNESCO-UNEVOC book series technical and vocational education and

- training: Issues, concerns and prospects (vol. 7, pp. 6–7).
Springer
- Ghufron, M. (2018). Revolusi Industri 4.0: Tantangan, Peluang, Dan Solusi Bagi Dunia Pendidikan. Seminar Nasional Dan Diskusi Panel Multidisiplin
- Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2018, 1(1), 332–337.
- Hanafi, I. (2012). Re-orientasi keterampilan kerja lulusan pendidikan kejuruan. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 2(1).
- Hanik, K., Purnomo, S. E., & Yulianto, A. (2023). Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Sekolah Vokasi Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Semarang*, Volume 1, 1190-1195.
- Han, X., Zhou, Q., Li, M., & Wang, Y. (Eds.). (2024). *Handbook of technical and vocational teacher professional development in the digital age*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-5937-2>
- Nurzaman AM, H. E., Alinuridin, H., & Baliano, P. (2019). *Profesi keguruan*. UNPAM PRESS.
- Pravana, N. K., Piryani, S., Chaurasiya, S. P., Kawan, R., Thapa, R. K., Shrestha, S., Brouwer, I. D., Jager, I. de, Borgonjen, K., Azupogo, F., Rooij, M., Folsom, G., Abizari, R., Frempong, R. B., Annim, S. K., Boah, M., Azupogo, F., Amporfro, D. A., Abada, L. A., ... WHO. (2017). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における
- Priatna, T. (2019). Disrupsi pengembangan sumber daya manusia dunia pendidikan di era revolusi industri 4.0. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Sutter, R. (2025). *Professional Identify Formation : History , Practice and Challenges Professional Identify Formation : History ,*

Practice and Challenges Rebecca Sutter Copyright 2024 – All Rights Reserved. January.

Shatakishvili, D. (2021). Skilled Labor Force as a Cornerstone of Entrepreneurial Economic Development - International Experience for Georgia. *Journal of World Economy: Transformations & Transitions*, 1(02), 1–14.
<https://doi.org/10.52459/jowett1251021>

Suryati, L., Ambiyar, A., Ahyanuardi, A., Efronia, Y., & Rahmadhani, S. (2024). The Urgency of Increasing Teacher Vocational Competence in the Era of Society 5.0. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 7(2), 6017–6031.
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v7i2.7588>

健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *Development Studies Research*, 3(1), 43.
<http://doi.org/10.1080/16070658.2018.1448503>
www.udspace.uds.edu.gh
<https://doi.org/10.1080/20469047.2017.1409453>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00298>
<http://www.gainhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/Ghana-Development-of-Food-based-Dietary>

Zhu, Z., & Peng, H. (2021). Innovation and development of technology-empowered wisdom education—Interview with Professor Zhu Zhiting, pioneer of wisdom education in China. *Journal of Teacher Education*, 4, 21–29.

Zhu, Z., & Wei, F. (2019). Education informatization 2.0: Smart education starts, smart education leads. *Audio-Visual Education Research*, 9, 5–16.

